

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional. Begitu pula pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu upaya bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian mandiri, berdisiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, cerdas, terampil serta sehat jasmani dan rohani.

Oleh karena itu bidang pendidikan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 31 yang menyatakan bahwa :

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran;*
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.*

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa :

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Begitu pula dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sektor pendidikan tampaknya mengalami perubahan yang cukup berarti. Penyusunan perencanaan program pendidikan kini lebih bertumpu pada prinsip-prinsip demokratisasi, peranserta masyarakat, pemberdayaan potensi sumber daya perencanaan yang dimiliki oleh daerah otonomi. Upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan pendidikan tersebut dalam pelaksanaannya diperlukan perangkat teknis yang mampu mendukung terhadap penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya.

Berbicara masalah sistem perencanaan pendidikan, maka makna otonomi dalam pembangunan sektor pendidikan adalah pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional untuk mengambil prakarsa dalam merumuskan rencana pendidikan secara partisipatif, koordinatif dengan memberdayakan segenap potensi sumber daya perencanaan yang dimiliki. Sumber daya perencanaan dimaksud antara lain meliputi keberadaan unit perencanaan pada struktur organisasi dinas pendidikan, kualifikasi tenaga perencana, mekanisme penyusunan dan pemanfaatan data, mekanisme kerja dan dukungan sumber daya keuangan.

Begitu pula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka yang merupakan lembaga teknis edukatif dalam era otonomi daerah ini perlu mengacu pada makna tersebut di atas, dimana dinas ini secara langsung bertanggung jawab dalam masalah pendidikan di daerahnya, sehingga dituntut

untuk mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pendidikan secara lebih profesional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kelembagaan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dituntut untuk selalu dinamis mengadakan penyesuaian-penyesuaian terhadap berbagai perubahan atau pembaharuan dalam bidang pendidikan. Hal ini terkait erat dengan program-program pembangunan dalam sektor pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam PROPENAS 1999-2004 yang menegaskan adanya upaya pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, serta perbaikan sistem manajemen pendidikan.

Sehubungan dengan pemerataan pendidikan, maka kegiatan-kegiatan pokok yang diperlukan antara lain: adanya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan ; adanya penerapan alternatif pelayanan pendidikan khususnya bagi masyarakat yang kurang beruntung ; adanya pelaksanaan revitalisasi sekolah-sekolah ; dan peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai program pendidikan.

Sehubungan dengan peningkatan kualitas maka beberapa kegiatan pokok adalah diupayakannya : peningkatan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya ; adanya penyusunan kurikulum yang berbasis kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan dan potensi pembangunan daerah ; adanya peningkatan penyediaan, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan ; peningkatan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar melalui antara lain pemetaan sekolah ; serta adanya peningkatan pengawasan akuntabilitas kinerja kelembagaan sehingga peran dan tanggungjawab sekolah, pemerintah daerah, termasuk lembaga legislatif dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan makin nyata.

Sedangkan kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka memperbaiki manajemen pendidikan ini mencakup antara lain : pelaksanaan desentralisasi bidang pendidikan secara bertahap, bijaksana dan profesional ; adanya pengembangan pola penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada manajemen berbasis sekolah ; dan peningkatan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Oleh karena itu untuk menanggapi perkembangan sistem pendidikan yang makin kompleks, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dituntut untuk dapat melaksanakan reorientasi, restrukturisasi dan revitalisasi manajemen kerja, agar lebih efektif, efisien dan proporsional yang pada gilirannya diharapkan dinamika kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dapat mengimbangi berbagai tantangan dan tuntutan di masa depan yang tidak semakin ringan dan tidak sederhana, yang dapat dilihat pada indikator perubahan-perubahan yang terjadi, baik pada lingkungan internal maupun pada lingkungan eksternal.

Sejalan dengan itu untuk memberikan makna terhadap eksistensi kelembagaan, khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka perlu dipikirkan adanya penentuan strategi serta gagasan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan administrasi pendidikan itu sendiri. Upaya untuk meningkatkan kemampuan kinerja tersebut salah satunya dengan memberdayakan sumber daya yang ada, baik secara eksternal maupun internal untuk mencapai tujuan produktivitas pendidikan melalui kegiatan perencanaan. Dengan pemberdayaan pada fungsi perencanaan ini memungkinkan lembaga itu dapat menanggapi tuntutan-tuntutan pasar secara cepat, fleksibel. dan efisien. Sehingga hasilnya diharapkan berkurangnya pemborosan, penundaan dan kesalahan,

juga terbangunnya suatu tim kerja yang utuh, yaitu dengan sumber daya yang dimanfaatkan secara penuh, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun biayanya. Begitu pula dengan adanya perencanaan yang baik akan tercipta suatu landasan bagi pelaksanaan aktivitas-aktivitas manajerial atau aktivitas-aktivitas administratif secara sistematis, dimana fungsi perencanaan itu sendiri dalam suatu organisasi akan memberikan suatu sistem keputusan yang terintegrasi dan merupakan “framework” (kerangka kerja) bagi aktivitas-aktivitas organisasi.

Dalam kerangka otonomi daerah atau desentralisasi pendidikan, sistem perencanaan ini mutlak diperlukan bagi organisasi pengelola pendidikan, terlepas dari apa, dan bagaimana ukuran, model serta bentuk organisasinya. Karena tanpa perencanaan yang baik, suatu organisasi menjadi kurang mampu untuk mencapai tujuan yang diharapkannya. Pengalaman menunjukkan bahwa tidak adanya suatu perencanaan, menyebabkan antara lain : kurang terorganisirnya kerjasama antar pegawai; kurangnya memfungsikan personel secara efektif baik kuantitatif maupun kualitatif; tidak mempunya mengantisipasi terhadap masalah-masalah yang akan datang; tidak adanya sinkronisasi kebutuhan organisasi dan kebutuhan personel, yang kesemuanya itu menyebabkan proses organisasi tidak berjalan dengan baik yang pada gilirannya menggagalkan pencapaian dari tujuan organisasi itu sendiri.

Sejalan dengan itu berbagai kelemahan dalam perencanaan, menurut Bintoro Tjokroamidjojo, dalam bukunya Perencanaan Pembangunan (1992:53) disebabkan oleh :

- (1) Perencanaan di banyak negara baru berkembang seringkali lebih merupakan dokumen politik mengenai cita-cita pembangunan yang dikehendaki, tetapi bukan merupakan cetak biru bagi kegiatan-kegiatan yang mungkin dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tertentu.

- (2) Dibalik itu apabila mungkin dirumuskan suatu rencana yang teknisnya cukup baik, kelemahannya adalah seringkali kurang mendapat dukungan politik yang diperlukan.
- (3) Kelemahan lain adalah seringkali terdapat kurang hubungan antara penyusunan rencana dengan pelaksanaan rencana. Ini menyebabkan rencana menjadi kurang feasible (kurang dapat dilaksanakan secara teknis). Hal ini bisa disebabkan karena perencana terlalu banyak bekerja "di belakang meja".
- (4) Banyak kelemahan rencana juga terjadi dalam bidang pilihan-pilihan berbagai alternatif yang merupakan "trade offs" (menguntungkan bagi yang satu, merugikan bagi yang lainnya).
- (5) Kelemahan lainnya adalah kurangnya data-data statistik, informasi, hasil-hasil riset dan survai untuk mendasari suatu perencanaan yang baik.
- (6) Kelemahan lain dalam perencanaan di negara-negara berkembang, ialah masih rendahnya penguasaan terhadap teknik-teknik perencanaan. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena masih kurangnya tenaga terdidik dalam bidang tersebut.

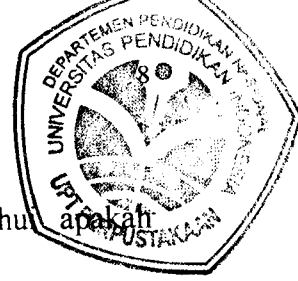
Begitu pula kelemahan ini terjadi dalam sistem perencanaan pendidikan khususnya pada kerangka otonomi daerah, dimana kelemahan tersebut antara lain masih terdapatnya berbagai gejala masih rendahnya efisiensi dalam pengelolaan administrasi pendidikan, terutama pada tingkat mezzo dan mikro, sehingga mengakibatkan tidak efisien dan tidak efektifnya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Kurang efisiennya kegiatan administrasi pendidikan tersebut, antara lain tercermin dari lemahnya perencanaan infrastruktur yang mencakup kelembagaan, ketenagaan, perlengkapan dan biaya pendukung ;

Adanya beberapa kelemahan tersebut di atas menuntut suatu institusi organisasi pendidikan untuk memberdayakan kembali sistem perencanaannya secara profesional agar mampu memperlihatkan hasil yang diasosiasikannya, yaitu dengan perencanaan yang sistematis, terpadu, berkelanjutan dan komprehensif menurut mekanisme dan prosedurnya, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggung jawabkan.

Terkait dengan strategi perencanaan dimaksud, maka diperlukan studi untuk melihat lebih dekat bagaimana peran unit perencana dinas pendidikan dalam menjalankan fungsi perencanaannya, baik dalam menyusun program-program pendidikan, kemampuan tenaga perencana pendidikan, mekanisme penyusunan dan pemanfaatan data pendidikan, mekanisme kerjasama serta dukungan sumber keuangan. Oleh karena itu fungsi perencanaan ini memegang peranan yang sangat penting sekali dalam manajemen sebuah organisasi, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan fungsi perencanaan pendidikan pada kantor dinas pendidikan tingkat kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah sekarang ini.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah. Identifikasi ini bertujuan untuk mendapatkan sejumlah masalah yang berhubungan dengan judul penelitian. Dalam kaitan dengan penelitian ini, maka identifikasi permasalahannya antara lain menyangkut langkah-langkah yang semestinya dilakukan dalam pemberdayaan fungsi perencanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa organisasi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah ini sudah selayaknya lebih terbuka dengan kemajuan-kemajuan yang ada. Manajemen dinas pendidikan tingkat kabupaten seyogyanya menyelaraskan langkah pengembangannya dalam kondisi yang semakin kompetitif terhadap tuntutan pemberdayaan sumber daya



yang dimilikinya. Begitu pula dinas pendidikan dituntut untuk mengetahui apakah yang menjadi peluang dan tantangan serta apakah yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, karena itu pula dinas pendidikan dituntut untuk mampu merencanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh daerahnya, sehingga dengan perencanaan, organisasi akan lebih jelas menentukan arah dan tujuannya. Dengan demikian pembahasan ini pada pokoknya akan menjawab sekitar pertanyaan di atas.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini merupakan usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah-masalah yang akan diteliti, dengan tujuan untuk mengetahui ruang lingkup yang dilakukan dalam penelitian, sehingga akan lebih terfokus. Adapun yang menjadi batasan masalah ini antara lain perencanaan yang dilakukan oleh unit perencanaan pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dengan fokus pada Perencanaan Pendidikan Sekolah Dasar dalam kerangka otonomi daerah tahun 2001.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini merupakan penjabaran dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Dengan kata lain, perumusan masalah ini merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah *"Bagaimanakah strategi pemberdayaan fungsi perencanaan pendidikan pada Kantor Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten dalam kerangka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah"*.

Selanjutnya rumusan masalah ini dapat dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut :

- (1) Apakah yang menjadi peluang dan tantangan lingkungan eksternal Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka di lihat dari aspek pemerintahan, geografi, demografi, ekonomi, sosial budaya, serta transportasi dan komunikasi ?
- (2) Apakah yang menjadi kekuatan dan kelemahan lingkungan internal Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka ?
- (3) Strategi apakah yang mungkin digunakan dalam pemberdayaan fungsi perencanaan pendidikan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka setelah berlakunya otonomi daerah ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Ingin memperoleh profil (gambaran lingkungan eksternal) Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka di lihat dari aspek pemerintahan, geografi, demografi, ekonomi, sosial budaya, serta transportasi dan komunikasi.
- (2) Ingin memperoleh profil (gambaran lingkungan internal) pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka ?
- (3) Mencari alternatif strategi yang mungkin digunakan dalam memberdayakan fungsi perencanaan pendidikan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka setelah berlakunya otonomi daerah,

sehingga selaras dan terpadu serta relevan dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangannya.



2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Sebagai upaya untuk mengembangkan metodologi perencanaan dalam aplikasinya di lapangan, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya menemukan alternatif model perencanaan strategis pembangunan bidang pendidikan, khususnya pada Dinas Pendidikan tingkat kabupaten, sehingga selaras dan terpadu sesuai dengan kondisi internal dan eksternal maupun relevansinya dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Majalengka.
- (2) Dapat menjelaskan secara empirik pentingnya pemberdayaan fungsi perencana bagi suatu unit organisasi.
- (3) Memberikan sumbangan pemikiran dalam memberdayakan tenaga perencana di unit/organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam implementasinya pada perencanaan pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Majalengka.
- (4) Hasil ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain yang berminat pada objek penelitian yang sama dengan kajian yang berbeda.

F. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan kerangka acuan yang menjadi landasan pemikiran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan penelitian. Landasan pemikiran ini meliputi beberapa konsep bahasan pada penelitian yang akan dilakukan, dimana kajian dalam penelitian ini yaitu menyangkut masalah strategi

perencanaan pendidikan pada Kantor Dinas Pendidikan tingkat kabupaten dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah.

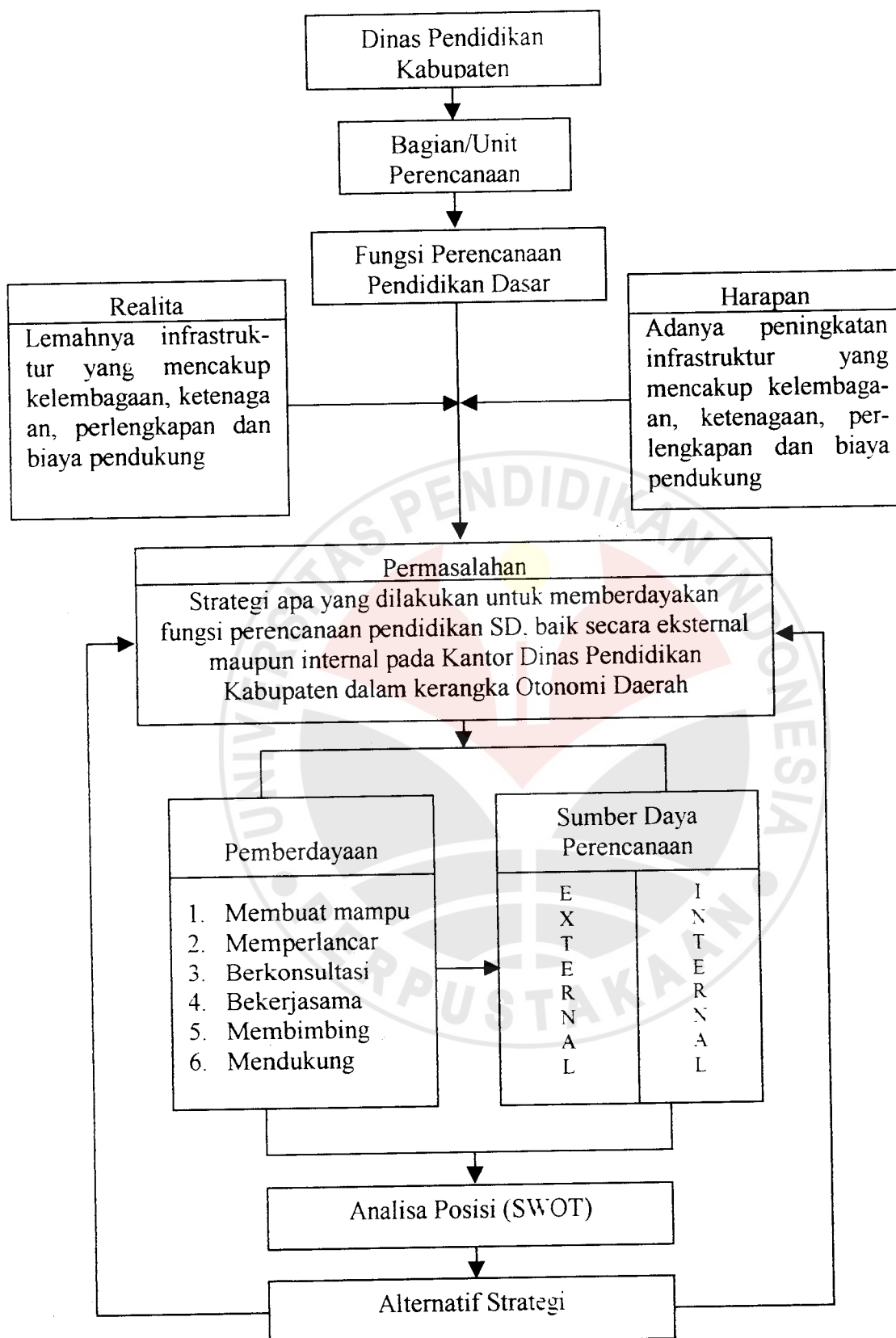
Kerangka berfikir dalam penelitian ini dikembangkan dari beberapa pemikiran, antara lain :

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten merupakan unsur pelaksana pemerintah yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat pada bidang pendidikan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, maka Dinas Pendidikan dihadapkan pada tuntutan kualitas pelayanan yang baik terhadap bidang pendidikan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju ;
- (2) Pada Kantor Dinas Pendidikan tingkat kabupaten terdapat unit atau bagian perencanaan dan evaluasi. Bagian perencanaan dan evaluasi ini sangat penting sekali, mengingat bahwa perencanaan berfungsi sebagai alat persiapan yang matang untuk melaksanakan dan mengevaluasi suatu kegiatan dengan pemanfaatan potensi sumber-sumber yang tersedia, baik manusia, sarana dan prasarana, maupun pembiayaannya ;
- (3) Salah satu untuk mencapai keberhasilan manajemen tersebut dapat dilakukan mulai dari pengelolaan perencanaannya, hal ini mengingat bahwa dengan perencanaan yang baik akan tercipta suatu landasan yang baik bagi pelaksanaan aktivitas-aktivitas manajerial atau aktivitas-aktivitas administratif secara sistematis. Sedangkan tujuan dari pada fungsi perencanaan itu sendiri dalam suatu organisasi ialah memberikan suatu sistem keputusan yang

terintegrasi dan merupakan “framework” (kerangka kerja) bagi aktivitas-aktivitas organisasi ;

- (4) Namun demikian pada kenyataannya bahwa fungsi perencanaan pada Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten pada umumnya belum dilaksanakan secara maksimal atau masih terdapat beberapa kendala atau kelemahan dalam pelaksanaannya, hal ini nampak dari realita yang ada. Oleh karena itu perlu diberdayakan kembali sesuai dengan prosedur yang sebenarnya, sehingga sistem perencanaan dapat memenuhi harapan yang diinginkan ;
- (5) Dengan pemberdayaan ini memungkinkan organisasi-organisasi untuk menanggapi pelanggan dan tuntutan pasar secara cepat, fleksibel, dan efisien, sehingga hasilnya adalah berkurangnya pemborosan, dan terbangunnya suatu tim kerja yang utuh dengan sumberdaya yang dimanfaatkan secara penuh, yaitu membuat mampu, memperlancar, berkonsultasi, bekerjasama, membimbing dan mendukung, sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan;
- (6) Kemudian fungsi perencanaan yang baikpun tidak terlepas dari pengaruh sumber daya perencanaan itu sendiri, baik secara eksternal maupun secara internal. Sedangkan mekanisme dalam sistem perencanaan itu sendiri antara lain dapat dimulai dari pra perencanaan, penyusunan rencana, implementasi rencana, serta evaluasi dan umpan balik.

Dari uraian di atas, secara integral pola penelitian atau kerangka penelitian tersebut dapat digambarkan berikut ini :



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

G. Sistematika Penulisan Tesis

Laporan tesis ini disusun terdiri dari enam bab, secara singkat sistematika tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan, di dalam bab ini dibahas mengenai : a) Latar Belakang Masalah yaitu yang memaparkan beberapa alasan mengapa penelitian ini dilakukan; b) Identifikasi Masalah yaitu bertujuan untuk mendapatkan sejumlah masalah yang berhubungan dengan judul penelitian; c) Pembatasan Masalah yaitu menetapkan batasan-batasan dari masalah-masalah yang akan diteliti; d) Perumusan yaitu beberapa masalah yang ada dirumuskan ke dalam satu masalah dengan batasan-batasannya, yang kemudian dijabarkan dalam tiga pertanyaan yang perlu dijawab; e) Tujuan dan Manfaat Penelitian yaitu memuat pentingnya tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan, baik bagi pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan pendidikan maupun bagi para peneliti pada bidang perencanaan pendidikan; f) Kerangka Penelitian yaitu yang memuat alur pikir yang dilakukan dalam penelitian; dan e) Sistematika Penulisan Tesis yaitu yang menjelaskan urutan secara sistematis mengenai laporan penelitian.

Bab Kedua : Bab ini menguraikan konsep-konsep secara teoritis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain meliputi : a) Konsep Administrasi Pendidikan; b) Pendekatan Sistem Organisasi Pendidikan; c) Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah yang menguraikan mengenai Kebijakan Otonomi Daerah dan implikasinya dalam Desentralisasi Pendidikan ; d) Konsep strategi dan Pemberdayaan ; e) Pendekatan Sistem Perencanaan Pendidikan yang memuat mengenai pengertian, fungsi, jenis, prinsip-prinsip menyusun rencana yang efektif, serta tahapan dalam perencanaan pendidikan :

f) Analisis Posisi Pendidikan yaitu yang menjelaskan bagaimana posisi atau potret pendidikan yang ada; g) Indikator Penilaian; dan h) Tinjauan Empiris yaitu yang memuat kajian peneliti terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan.

Bab Ketiga : Metodologi penelitian yaitu yang menjelaskan tentang mekanisme yang ditempuh dalam melakukan penelitian, baik mengenai metode penelitian, subyek penelitian, teknik atau cara pengumpulan data. Sedangkan langkah-langkah penelitian ini terdiri dari tahap orientasi, tahap eksplorasi maupun tahap member chek. Selanjutnya dalam bab ini diuraikan pula mengenai analisis data penelitian yang menguraikan tentang proses penyusunan data yang ditafsirkan, kemudian diuraikan pula mengenai validasi temuan penelitian yang berisi mengenai teknik pemeriksaan tingkat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan, baik secara kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas maupun secara konfirmabilitas.

Bab Keempat : Hasil Penelitian, yaitu yang membahas mengenai hasil temuan penelitian dari lapangan, dimana temuan tersebut dibagi ke dalam dua bagian yaitu gambaran umum dan gambaran khusus yang menggambarkan profil eksternal dinas pendidikan dan yang menggambarkan profil internal dinas pendidikan.

Bab Kelima : Pokok-pokok Temuan dan Pembahasan Hasil Penelitian, dimana bagian ini secara khusus membahas masalah konsepsi pokok-pokok penting dari hasil penelitian dan kemudian disertai pembahasannya, baik yang berkaitan dengan kondisi eksternal maupun dengan kondisi internal.

Dari data tersebut kemudian dianalisis serta dihubungkan dengan konsep atau teori yang dimuat dalam bab sebelumnya.

Bab Keenam : yaitu merupakan bab yang terakhir yang berisikan kesimpulan, implikasi dan rekomendasi dari hasil kajian bab-bab sebelumnya.



